

**A. HAK ATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME**

1. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai keberagaman dan pluralisme

Ada  Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Tingkat Kecamatan
- SK. Bupati Karanganyar Nomor 471/203 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia
- SK Bupati Karanganyar Nomor 450/882 Tahun 2018 tentang Pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karanganyar Masa Bhakti 2018 – 2023

2. Perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat pengarusutamaan HAM

Ada  Tidak Ada

3. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang program dan/atau kegiatan FKUB

Ada  Tidak Ada

4. Tersedianya tim terpadu penanganan konflik sosial

Ada  Tidak Ada

5. Adanya kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan

Ada  Tidak Ada

6. Tersedianya analisis produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila

Ada  Tidak Ada

7. Program dan atau kegiatan di lingkungan institusi pemerintah daerah mengenai keberagaman dan pluralisme

Ada  Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan !*

- Silaturahmi Forkompimda dengan Tokoh Agama.
- Pembinaan FKUB, FPBI dan Organisasi Penghayat Kepercayaan.
- Sosialisasi dan penyerapan aspirasi ke kecamatan.
- Silaturahmi ke organisasi keagamaan.
- Pembinaan alumni sekolah kerukunan.
- Pembentukan forum generasi muda lintas agama.

8. Proporsi institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralism

- Jumlah institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme 17

- Jumlah seluruh institusi daerah di wilayah kabupaten/kota 42

9. Terlaksananya kegiatan FKUB

Terlaksana       Tidak Terlaksana

10. Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti

- Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti Tidak ada/ Nihil
- Jumlah kasus pelayanan publik yang diskriminatif Tidak ada/ Nihil

Demikian data capaian pada hak atas keberagaman dan pluralisme ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Karanganyar, 25 Januari 2022

Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Karanganyar



BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19650329 198703 1 007